

## Analisa Perbandingan Profil Korban *Fraud* di Berbagai Wilayah Pasca Pandemi Covid-19

Natalis Christian<sup>1</sup>, Karen<sup>2</sup>, Kelvina Yenanda<sup>3</sup>, Vinvin Evelyn<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Internasional Batam/Fakultas Bisnis dan Manajemen

e-mail: natalis.christian@uib.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Internasional Batam/Fakultas Bisnis dan Manajemen

e-mail: 2042058.karen@uib.edu

<sup>3</sup>Universitas Internasional Batam/Fakultas Bisnis dan Manajemen

e-mail: 2042101.kelvina@uib.edu

<sup>4</sup>Universitas Internasional Batam/Fakultas Bisnis dan Manajemen

e-mail: 2042065.vinvin@uib.edu

### ARTICLE INFO

Article history:

Received 30 April 2023

Received in revised form 2 Mei 2023

Accepted 10 Juni 2023

Available online Juli 2023

### ABSTRACT

*This study aims to present a comparison of fraud victim organizations based on several categories including organizational size, type of organization, and so forth. The impact of ineffective governance determines the level of losses in fraud cases. This study uses a literature review to compile research findings. Based on the reference, the highest percentage of fraud cases in global and Asia-Pacific was achieved by private companies. The 2019 ACFE Indonesia Report reveals that private companies contribute 48.50% to the percentage of fraud cases with an amount of loss in the range of Rp500 million to Rp1 billion. The increase in fraud cases was also influenced by the impact of the Covid-19 pandemic which began at the end of 2019. Meanwhile, report to nations which cover the global area at 44% for the same type of company. Economic stability is threatened by the percentage level which was close to 50%.*

**Keywords:** *Fraud, Loss, Organization*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan perbandingan organisasi korban *fraud* berdasarkan beberapa kategori termasuk ukuran organisasi, jenis organisasi, dan lain sebagainya. Dampak tata kelola yang kurang efektif, menentukan tingkat kerugian kasus *fraud* yang terjadi. Penelitian menggunakan studi pustaka dalam menyusun temuan penelitian. Dari referensi yang digunakan, ditemukan bahwa persentase tertinggi kasus *fraud* baik dari lingkup global maupun Asia-Pasifik, diraih oleh perusahaan swasta. Laporan ACFE Indonesia 2019 mengungkapkan bahwa perusahaan swasta telah menjalankan aksi *fraud* sebesar 48,50% dengan nilai kerugian sebanyak Rp500 juta hingga 1 Miliar. Kenaikan kasus *fraud* turut dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang dimulai pada akhir tahun 2019. Sedangkan laporan *report to nation* yang melingkupi wilayah global, menempati tingkat persentase 44% untuk jenis perusahaan yang sama. Tingkat persentase yang hampir mencapai 50% dapat mengancam stabilitas ekonomi.

**Kata Kunci:** *Fraud, Kerugian, Organisasi*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, kejahatan ekonomi telah diselidiki secara menyeluruh di tingkat internasional dan nasional, dengan penekanan pada korupsi dan penyuapan. Kejahatan ekonomi atau keuangan mengacu pada tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan material, ekonomi, keuangan, atau profesional yang ilegal. Kejahatan ekonomi menarik organisasi kriminal berkat kecilnya kemungkinan penipuan ini ditemukan. Di sisi lain, individu dan organisasi sama-sama tidak menyadari risiko menjadi korban kejahatan ekonomi [1]. *Fraud* adalah salah satu penipuan yang dilakukan dengan sengaja sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian tanpa diketahui oleh pihak yang terkait dan menguntungkan pelaku *fraud* tersebut. *Fraud* dapat berupa penipuan laporan keuangan, korupsi, dan sebagainya. Adapun dampak dari *fraud*, yaitu dapat menghancurkan reputasi organisasi, merugikan organisasi, dan dampak buruk lainnya [2].

Penipuan keuangan ini telah meluas dan beragam, yang mencerminkan kreativitas para penipu yang tumbuh dan motivasi permanen para korban untuk pengembalian tinggi yang cepat. Ada kebingungan konseptual antara penipuan keuangan dan investasi. Penipuan keuangan mencakup tindakan ilegal yang lebih luas seperti pengelabuan, pencurian identitas, atau penipuan asuransi. Pada penipuan investasi yang paling umum termasuk *boiler room*, piramida, dan skema Ponzi. Skema *boiler room* melibatkan tekanan pada calon korban untuk berinvestasi dalam saham fiktif atau bernilai rendah. Penipu menggunakan panggilan dingin untuk korban dan mempresentasikan bisnis mereka menggunakan referensi palsu. Di sisi lain, skema piramida dan Ponzi serupa, tetapi dalam kasus piramida, investor pertama perlu merekrut investor baru untuk menghasilkan keuntungan [3].

Pada tahun 2020, kondisi ekonomi menjadi semakin buruk dan kurangnya pengawasan dikarenakan perusahaan lebih fokus menghadapi krisis pandemi *Covid-19*. Tindakan ini membuka peluang bagi para pelaku *fraud* di perusahaan yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. *Covid-19* telah menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah pada dunia. Pandemi *Covid-19* ini telah menimbulkan keadaan krisis pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan manusia, namun pandemi ini secara tidak langsung juga menyebabkan perekonomian semakin lemah dan buruk. Hal ini dapat terlihat jelas dengan banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga daya beli rakyat juga menurun drastis. Oleh karena itu, kejahatan dan kecurangan dapat semakin meningkat akibat pandemi ini [4].

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019, menyatakan bahwa kasus penipuan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi dengan persentase sebesar 64.4%. Selanjutnya, jenis kasus penipuan yang terjadi selain kasus korupsi yaitu penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan dengan persentase sebesar 28.9%, dan penipuan laporan keuangan dengan persentase sebesar 6.7%. Biasanya, kasus korupsi yang umum terjadi seperti penyuapan atau gratifikasi, pungutan liar, penyalahgunaan kekuasaan, pembayaran suap untuk proyek tertentu di bawah kolusi dan nepotisme [5]. Pada dasarnya, korupsi adalah perilaku yang dapat mengarah pada bagian yang disengaja. Karyawan dan manajer melakukan kejahatan ini, dapat menyebabkan kerugian finansial dan non-finansial bagi perusahaan. Kerugian ini bisa berakibat fatal dan berujung pada kebangkrutan [6].

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ACFE di berbagai negara pada tahun 2020, mengungkapkan bahwa ada 2.504 kasus penipuan pekerjaan di antara Januari 2018 dan September 2019. Ini adalah sebagian kecil dari jumlah penipuan yang dilakukan setiap tahun terhadap jutaan bisnis, organisasi pemerintah, dan organisasi nirlaba di seluruh dunia. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi pada 23 kategori industri yang berbeda. Penipuan ini mempengaruhi organisasi multinasional besar, organisasi nirlaba kecil, dan setiap ukuran dan jenis bisnis atau lembaga pemerintah di antaranya. Pada negara Amerika Serikat dan Kanada terdapat 895 kasus dengan persentase sebesar 46%, Afrika Sub-Sahara terdapat 301 kasus dengan persentase sebesar 15%, Asia-Pasifik terdapat 198 kasus dengan persentase sebesar 10%, Eropa Bagian Barat terdapat 128 kasus dengan persentase sebesar 7%, Timur Tengah dan Afrika Utara terdapat 127 kasus dengan persentase sebesar 7%, Asia Selatan terdapat 103 kasus dengan persentase sebesar 5%, Amerika Latin dan Karibia terdapat 101 kasus dengan persentase sebesar 5%, dan Eropa Timur dan Asia Barat/Tengah terdapat 95 kasus dengan persentase sebesar 5%.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh ACFE di berbagai negara pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa ada 2.110 kasus penipuan pekerjaan di antara Januari 2020 dan September 2021. Pada negara Amerika Serikat dan Kanada terdapat 675 kasus dengan persentase sebesar 36%, Afrika Sub-Sahara terdapat 429 kasus dengan persentase sebesar 23%, Asia-Pasifik terdapat 194 kasus dengan persentase sebesar 10%, Eropa Bagian Barat terdapat 145 kasus dengan persentase sebesar 18%, Timur Tengah dan Afrika Utara terdapat 138 kasus dengan persentase sebesar 7%, Asia Selatan terdapat 138 kasus dengan

persentase sebesar 7%, Amerika Latin dan Karibia terdapat 95 kasus dengan persentase sebesar 5%, dan Eropa Timur dan Asia Barat/Tengah terdapat 78 kasus dengan persentase sebesar 4%.

Viktimologi tetap menjadi salah satu bidang yang paling banyak dipelajari dalam menganalisis penipuan keuangan. Ketika sebuah skema terungkap, ribuan orang yang mengira bahwa uang mereka diinvestasikan dalam bisnis yang aman dan menguntungkan kehilangan segalanya. Penipuan keuangan adalah jenis bisnis yang telah meningkat secara eksponensial di seluruh bagian dunia, belakangan ini memiliki kapasitas ekspansi yang lebih besar. Hal ini dikarenakan masa-masa sulit di mana orang hidup, diganggu oleh krisis ekonomi besar, tingkat pengangguran yang tinggi dan ketidakamanan pekerjaan. Sejumlah besar orang yang putus asa ingin mendapatkan tingkat investasi yang tinggi dalam waktu singkat. Peluang seperti itu menjadi sangat menggoda bagi banyak orang. Faktor lainnya adalah globalisasi komunikasi, dan pasar, manipulasi yang mudah melalui Internet, yang berarti perusahaan penipu tidak harus membuat kantor pusat fisik di negara tertentu [1].

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Fraud*

*Fraud* dapat disebut penipuan, kecurangan, ataupun penggelapan. *Fraud* merupakan perwujudan aliran pemikiran seseorang untuk memanfaatkan oportunistik yang dimiliki. Umumnya, *fraud* dilakukan dengan melakukan tipu daya atas sumber daya atau aset seseorang. *Fraud* mencakup representasi tentang hal material yang salah dan bersifat sengaja untuk merugikan korban. Kegiatan merugikan ini berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja. Aksi *fraud* dilandaskan pada kejahatan terkait keuangan dan kepercayaan.

Berdasarkan teori pelaporan keuangan, klasifikasi *fraud* dapat dibagi menjadi kecurangan akan laporan dan transaksi [7]. Sedangkan tindakan kecurangan yang diklasifikasikan kepada empat kelompok berdasarkan korbannya pertama, organisasi, kedua, manajemen perusahaan, ketiga, penipuan investasi serta penipuan konsumen lainnya dan keempat, penipuan lain-lain. Klasifikasi pada organisasi terjadi karena adanya perlintasan batasan manajemen dan karyawan atau diantara orang dalam dan luar. Tindakan tersebut ditunjukkan dengan adanya penggelapan pembayaran pelanggan, melebihi-lebihkan jam kerja untuk mendapatkan uang lembur, melebihi-lebihkan biaya operasi, pengajuan klaim medis palsu dan semacamnya.

Pada manajemen perusahaan, korban lebih terarah pada pemegang saham dan pemegang utang organisasi. Salah satu hal yang mendasari terjadinya kerugian ialah *mismanagement* dengan meninggalkan bagian operasi tertentu dari pengawasan [8]. Penipuan atas investasi banyak terjadi karena kurangnya kewaspadaan, salah satunya dengan melakukan pembelian melalui broker yang tidak sah [9]. Sementara itu, penipuan lain-lain terjadi kapan saja disaat seseorang memanfaatkan kepercayaan orang lain untuk menipunya.

Penelitian berbasis teori diperlukan untuk mengetahui pergerakan profil korban melampaui karakteristik populasi dengan mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang terkait dalam menjadi korban *fraud*. Teori penipuan dapat menjadi alat pendeteksi kemungkinan terjadinya penipuan pada perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi. Teori tersebut ialah, *fraud triangle theory*, *diamond theory*, dan *fraud pentagon theory* [10]. Perbedaan antara ketiga teori terletak pada elemen yang terkandung pada masing-masing bentuk. *Fraud triangle* memiliki elemen yang terdiri dari, tekanan atau insentif, peluang, dan rasionalisasi [11]. Kemudian, ditambahkan elemen kompetensi dalam *diamond theory* serta arogansi dalam *fraud pentagon theory*.

Teori *pentagon* ialah media yang digunakan dalam mendeteksi bahkan mencegah penipuan jika analisis perilaku dilakukan sebagai sarana pengelolaan dan pengawasan [12]. Keadaan ini dikarenakan komponen yang terkandung pada ketiga teori ini mengandung pembentukan karakter yang sesuai dengan aksi *fraud*. Karakteristik individu dari para pelaku selaras dengan beban kerja, etika, dan kemampuan yang membawa keberhasilan realisasi kecurangan [13]. Salah satu hal yang konstan dalam penipuan adalah perubahan karena merupakan proses dinamis yang berlapis-lapis dan menembus ke dalam prosedur perusahaan sementara, penipu selalu menemukan cara baru untuk melakukan penipuan dan menutupi jejaknya. Akibatnya, berurusan dengan prosedur penipuan yang panjang dan rumit dengan pemahaman yang mendalam tentang alasan di balik terjadinya dan cara yang tepat untuk ditanggulangi [14]. *Fraud* menjadi masalah pada global dan Asia-Pasifik atas organisasi manapun saat insiden penipuan ini meningkat terutama, ketika didorong dengan krisis keuangan global dan resesi ekonomi [15].

#### 2.1.1. *Fraud Victim*

Viktimisasi atau proses penimbunan korban untuk kasus *fraud* dilakukan dengan menggabungkan tingkat risiko dengan kerugian bagi korban. Pelaku mampu menciptakan signifikansi atas jumlah penipuan

dalam sebuah populasi [16]. Penipuan dapat menargetkan individu, perusahaan swasta, bisnis atau organisasi pemerintah yang mampu menyebabkan biaya yang relatif tinggi [17]. Karena sebagian besar penipuan tidak terdeteksi dan sering diselesaikan dengan membungkam informasi kasus, kerugian nyata dan biaya yang sebenarnya di luar pemahaman kemungkinan besar terabaikan [16].

Mengingat realitas yang mungkin “sulit diserap” komunitas bisnis dan pemangku kepentingan perlu mewaspadai kondisi yang mengarah pada tingkat kerugian penipuan. Pemahaman ini diperlukan untuk pengambilan langkah pembatasan yang tepat atas kondisi dan risiko yang mengarah pada tingginya tingkat kerugian. Faktor penentu kerugian ini banyak ditentukan melalui profil penipu seperti usia, jenis kelamin, masa kerja, kebangsaan, agama, pendidikan, keterampilan penipuan, posisi dan pengaruhnya. Selain itu, adapula ukuran organisasi, etika budaya, dan tingkat internal kontrol [16].

Perilaku kecurangan dalam suatu perusahaan mampu mempengaruhi pengauditan melalui laporan keuangan yang terkontaminasi kecurangan. Pengauditan ini dikelola dengan teknik *analytical procedure* berdasarkan prosedur pemeriksaan yang diterapkan pada beberapa bagian dan sisi [18]. Penipuan perusahaan telah mengalami perubahan pada beberapa dekade terakhir dimana, ruang lingkup penelitian yang terfokus pada analisis kecurangan pelaporan keuangan mulai mencakup kecurangan para pemangku kepentingan, pelanggaran peraturan, dan penipuan pemerintah [19].

Ada beberapa spekulasi mengenai psikologis yang khas dari korban penipuan yang ditanyakan dalam lingkup umum. Titus dan Gover, 2011 dalam penelitian terdahulu, [20] menyatakan bahwa korban penipuan cenderung kooperatif, serakah, mudah tertipu atau tidak kritis, ceroboh, mudah disanjung, mudah diintimidasi, pengambil risiko, murah hati, menghormati otoritas, dan warga negara yang baik.

Kecurangan yang menimbulkan korban mampu menimbulkan kerugian finansial dan nonfinansial yang disertai kerusakan mental seseorang. Beberapa akibat yang ditimbulkan yaitu, rusaknya nama baik badan yang menjadi objek tindakan fraud, adanya tekanan mental dan fisik bagi korban dalam jangka pendek ataupun panjang, timbulnya jumlah kerugian dalam keuangan pemerintahan, dan semacamnya [21].

### 2.1.2. Forensic Accounting

Akuntansi forensik berjalan sebagai bentuk pencegahan dari terjadinya penipuan. Perlindungan, deteksi, dan pencegahan merupakan pengendalian yang wajib untuk dilakukan. Pemberlakuan aktivitas akuntansi forensik menimbulkan tata kelola perusahaan yang efektif dan mampu mengurangi risiko penipuan, mencegah penipuan, dan mendeteksi penipuan khususnya, perusahaan, penipuan orang dalam, dan pengalihan aset. Beberapa perusahaan juga menggunakan mekanisme tata kelola perusahaan untuk meningkatkan reputasi mereka setelah terdeteksi penipuan. Pengaruh efektivitas tata kelola meliputi struktur kepemilikan, akuntabilitas, kepemimpinan serta peran etika sebab itu, kontrol anti *fraud* terlaksana dengan benar [22].

Audit investigatif adalah bentuk pengungkapan kecurangan dengan menginvestigasi bukti-bukti atas kasus yang menyimpang dan berpotensi memiliki unsur kecurangan. Kombinasi audit investigatif dan audit forensik ditujukan untuk menemukan fakta yang mendorong kebenaran atas kecurigaan dengan ilmu akuntansi dan audit. Jalan kerja audit investigatif turut membawa dampak terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit melalui pembuktian lebih awal sebelum kondisi kecurangan yang dilakukan oleh internal atau eksternal lebih meluas. Pelaksanaan audit investigatif yang diiringi akuntansi forensik memberikan interpretatif yang lebih signifikan terhadap efektivitas tata kelola [23]. Analisis penipuan patut untuk dikembangkan dengan memasukkan analisis faktor penipuan lainnya seperti, penyalahgunaan aset perusahaan ataupun mengembangkan pengukuran atau sistematis yang mampu mendeteksi kecurangan baik di bidang keuangan, properti, real estate, hingga konstruksi [19]

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan membuat gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat diungkapkan dengan kata-kata dan memberikan pengetahuan yang mendetail dari sumber informasi [24]. Penelitian ini juga dilakukan dengan merangkum dan memberikan evaluasi kritis dari data-data yang diperoleh.

### 3.2 Jenis Data

Peneliti menggunakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Kualitatif, yang merupakan informasi tulisan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan asosiasi pemeriksa *fraud* maupun laporan peneliti sebelumnya terkait korban dari *fraud* di berbagai wilayah. Data tersebut dapat berupa profil, kategori dari korban *fraud*, dan lain sebagainya.
2. Data Kuantitatif, yang merupakan data angka yang dikumpulkan dari berbagai sumber terkait korban *fraud* berupa persentase, jumlah, dan lain sebagainya. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil survei peneliti sebelumnya atau laporan asosiasi pemeriksa *fraud* yang dirangkum untuk mendukung penelitian ini.

### 3.3 Sumber Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder berarti peneliti mengumpulkan informasi melalui perantara atau merupakan informasi yang sudah dipublikasikan sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya demi memenuhi kebutuhan penelitian ini. Data tersebut diperoleh melalui laporan Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau yang disebut dengan Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat. Beberapa tahun terakhir, ACFE telah menghasilkan beberapa laporan terkait fraud di berbagai wilayah, yaitu di Indonesia, Asia Pasifik, maupun secara global.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka atau yang disebut dengan *literature review*. Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan penghimpunan informasi dari berbagai sumber yang kemudian data dikutip dan dirangkum untuk disajikan sebagai temuan dari penelitian [25]. Informasi tersebut diinterpretasikan untuk penarikan kesimpulan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan [26] terdapat beberapa jenis organisasi yang dirugikan oleh *fraud* yaitu organisasi pemerintahan, badan usaha milik negara, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan lain sebagainya. Berdasarkan laporan survei *fraud* Indonesia tahun 2019, organisasi yang paling dirugikan akibat *fraud* di Indonesia adalah organisasi pemerintahan. 48,50% kerugian akibat *fraud* di Indonesia dialami oleh organisasi pemerintahan. Sementara itu, organisasi yang paling dirugikan kedua setelah organisasi pemerintahan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu sebesar 31,80%. Selanjutnya diikuti oleh perusahaan swasta yaitu sebesar 15,10%, organisasi nirlaba sebesar 2,90%, dan organisasi lainnya sebesar 1,70%. Data hasil survei tahun 2019 ini dapat dikatakan konsisten dengan temuan pada laporan sebelumnya pada tahun 2016, karena pada laporan sebelumnya juga menunjukkan hasil bahwa organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang paling dirugikan akibat *fraud* di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Kerugian Berdasarkan Jenis Organisasi di Indonesia Tahun 2019

Nilai Kerugian	Organisasi Lainnya	Organisasi Nirlaba	Pemerintah	BUMN	Perusahaan Swasta
<Rp 10 Juta	26,20%	13,00%	6,50%	12,70%	7,50%
Rp10 Juta - Rp50 Juta	8,70%	17,40%	6,40%	7,90%	9,40%
Rp50 Juta - Rp100 Juta	8,70%	8,70%	11,70%	11,10%	13,20%
Rp100 Juta - Rp500 Juta	13,00%	8,70%	14,30%	17,50%	15,10%
Rp500 Juta - Rp1 Milyar	17,40%	17,40%	23,40%	15,90%	24,50%

Rp1 Milyar - Rp5 Milyar		8,70%	7,80%	9,50%	13,20%
Rp5 Milyar - Rp10 Milyar	13,00%	8,70%	9,10%	14,30%	3,80%
>Rp10 Milyar	13,00%	17,40%	20,80%	11,10%	13,30%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Data tabel di atas yang diperoleh dari laporan hasil survei *fraud* tahun 2019 menunjukkan rata-rata kerugian yang dialami oleh berbagai jenis organisasi atau lembaga di Indonesia. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan jumlah kerugian yang paling banyak dialami oleh organisasi-organisasi di Indonesia adalah sebesar Rp500 Juta hingga Rp1 Miliar. Namun, jenis organisasi yang paling banyak mengalami kerugian di rentang Rp500 Juta hingga Rp1 Miliar adalah perusahaan swasta yaitu sebesar 24,50% dan diikuti oleh organisasi pemerintahan sebesar 23,40%. Oleh karena itu, perusahaan swasta harus lebih berhati-hati terhadap adanya *fraud* dan meningkatkan pengendalian internal perusahaannya. Sementara kerugian terbesar berdasarkan data tabel di atas yaitu dengan rata-rata kerugian lebih dari Rp10 Miliar paling banyak dialami oleh organisasi pemerintahan yang menunjukkan persentase sebesar 20,80%. Hal ini juga konsisten dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa organisasi pemerintahan adalah organisasi yang paling dirugikan akibat *fraud* di Indonesia. Organisasi pemerintahan dapat menjadi organisasi yang paling dirugikan karena kecenderungan para pelaku *fraud* di Indonesia yang memanfaatkan proyek pemerintah untuk melakukan kejahatan demi kepentingan diri sendiri.

Organisasi yang mengalami kerugian akibat *fraud* terbanyak kedua adalah organisasi nirlaba sebesar 17,40%, kemudian perusahaan swasta sebesar 13,30%, organisasi lainnya 13%, dan BUMN 11,10%. Berdasarkan data dari hasil survei *fraud* di Indonesia oleh ACFE tersebut, jenis industri yang paling banyak dirugikan akibat *fraud* adalah industri perbankan dan keuangan yaitu sebesar 41,40%. Secara umum, *fraud* yang banyak terjadi dalam industri perbankan dan keuangan adalah pencurian identitas, *fraud* pinjaman, transfer, pengambilalihan akun, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, organisasi dalam industri ini termasuk bank harus lebih memperhatikan dan menerapkan strategi pencegahan *fraud* dengan efektif. Setelah industri keuangan, jenis industri kedua yang paling dirugikan oleh *fraud* di Indonesia adalah pemerintahan yaitu sebesar 33,90% dan jenis industri lainnya tidak melebihi 5%.

Data di atas merupakan hasil survei *fraud* pada tahun 2019, dimana pada periode tersebut belum terdapat virus *Covid-19*. Virus *Covid-19* mulai muncul pada akhir tahun 2019 dan mulai melanda Indonesia tepatnya pada bulan Maret 2020. Pandemi ini telah menyebabkan berbagai macam permasalahan pada masyarakat di setiap wilayah, termasuk masalah kesehatan, keselamatan, maupun perekonomian. Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan timbulnya semakin banyak masalah kejahatan yaitu kecurangan atau *fraud* sesuai dengan laporan dari berbagai lembaga dan organisasi di dunia. Berdasarkan laporan ACFE, kejahatan *fraud* telah meningkat secara signifikan setelah pandemi *Covid-19* melanda, terutama *cyber fraud*. Hal ini disebabkan oleh penerapan jarak sosial yang mengharuskan segala pola interaksi untuk beralih pada dunia maya, sehingga tingkat kejahatan di dunia maya juga meningkat drastis. Berbagai tantangan yang timbul akibat pandemi *Covid-19* seperti kesulitan ekonomi juga mendorong peningkatan kecurangan atau *fraud* terjadi di berbagai wilayah. Berikut merupakan data survei *fraud* setelah pandemi *Covid-19* melanda yaitu pada tahun 2020 hingga 2022.

Perubahan ekonomi akan terlihat melalui kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor. Kegiatan ini akan menghasilkan keuntungan dari kesepakatan antar negara. Penerapan *lockdown* sebagai tindakan pencegahan penyebaran *Covid-19* memberikan dampak penurunan nilai ekspor sebanyak \$163,2 Miliar (USD) dan impor sebanyak \$141,6 Miliar (USD). Observasi menunjukkan penurunan nilai ekonomi akan kehilangan pengendalian terhadap harga barang dimana, turut memicu kehancuran pengendalian lainnya. Tekanan-tekanan yang timbul sebagai akibat dari kondisi negara inilah yang memicu tindakan *fraud* [27].

Selain laporan survei *fraud* di Indonesia, ACFE juga menerbitkan laporan dengan edisi wilayah Asia Pasifik pada tahun 2020, yaitu tahun dimana pandemi *Covid-19* terjadi. Berdasarkan [28], perusahaan swasta

menunjukkan persentase kasus *fraud* terbanyak di wilayah Asia Pasifik dibandingkan jenis organisasi lainnya yaitu sebesar 37%, yang kemudian diikuti oleh perusahaan terbuka pada posisi kedua dengan persentase kasus *fraud* sebesar 36%. Sama dengan banyaknya persentase kasus *fraud* dalam perusahaan swasta, jenis perusahaan ini juga memiliki rata-rata kerugian terbanyak yaitu sebesar \$220,000. Perusahaan harus menyusun dan menerapkan *internal control* untuk mencegah terjadinya kasus *fraud* dan menghindari adanya kerugian finansial yang besar. Jenis organisasi dengan rata-rata kerugian terbanyak kedua juga diikuti oleh perusahaan terbuka yaitu sebesar \$190,000. Sementara itu, pemerintah menduduki posisi ketiga dengan rata-rata kerugian sebesar \$173,000.

Apabila dilihat dari ukuran perusahaannya, berdasarkan hasil laporan edisi Asia Pasifik, perusahaan kecil dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang cenderung memiliki rata-rata kerugian akibat *fraud* yang lebih besar dibandingkan perusahaan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. Pada perusahaan kecil dengan karyawan di bawah 100 orang, rata-rata kerugian akibat *fraud* sebesar \$213,000, sedangkan pada perusahaan besar dengan jumlah karyawan di atas 100 orang mengalami rata-rata kerugian sebesar \$180,000. Hal ini dapat disebabkan karena pada perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang sedikit, para karyawan serta atasan cenderung memiliki hubungan yang lebih dekat sehingga menurunkan tingkat kewaspadaan terhadap adanya *fraud*. Sementara pada perusahaan besar biasanya cenderung memiliki lebih banyak sumber daya modal dan sumber daya manusia untuk melakukan tindakan pencegahan *fraud*. Oleh karena itu, kerugian akibat *fraud* pada perusahaan kecil lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih besar.

Skema *fraud* yang terjadi dapat berupa korupsi, penagihan, manipulasi laporan keuangan, kas di tangan, penggantian biaya, dan *non-cash*. Berdasarkan hasil laporan di wilayah Asia Pasifik tahun 2020, lima skema *fraud* yang paling banyak terjadi pada perusahaan kecil dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang secara berurutan adalah korupsi, penagihan, manipulasi laporan keuangan, kas di tangan, dan penggantian biaya. Skema korupsi yang terjadi di perusahaan kecil mencapai 39%. Sementara itu, pada perusahaan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang, lima skema *fraud* yang paling banyak terjadi secara berurutan adalah korupsi, *non-cash*, penggantian biaya, penagihan, dan manipulasi laporan keuangan. Sama seperti perusahaan kecil, skema *fraud* yang paling banyak terjadi pada perusahaan besar adalah korupsi, namun dengan persentase yang lebih besar yaitu sebesar 53%. Korupsi yang dilakukan dapat berupa pemerasan, penyuapan, dan lain sebagainya.

Pada wilayah Asia Pasifik, berdasarkan jenis industrinya, industri energi mengalami rata-rata kerugian akibat *fraud* paling banyak dibandingkan industri lainnya. Industri ini mengalami rata-rata kerugian sebesar \$875,000. Sementara industri berikutnya dengan rata-rata kerugian terbanyak akibat *fraud* adalah industri manufaktur yaitu sebesar \$400,000. Kemudian, industri perbankan dan keuangan sebesar \$150,000, pemerintah sebesar \$135,000, teknologi sebesar \$124,000, dan *retail* sebesar \$50,000. Namun, jumlah kasus *fraud* terbanyak terjadi pada industri perbankan dan keuangan. Konsisten dengan hasil survei *fraud* di Indonesia, hasil laporan ACFE edisi Asia Pasifik juga menyatakan bahwa kasus *fraud* paling banyak terjadi pada industri perbankan dan keuangan dibandingkan jenis industri lainnya.

Berdasarkan dari laporan [29], [30] tahun 2020 dan 2022, ada beberapa tipe organisasi yang menjadi korban dari *fraud*, yaitu perusahaan swasta, perusahaan publik, pemerintah, organisasi nirlaba, dan lainnya. Pada tahun 2020, terdapat 70% *fraud* yang terjadi di organisasi profit, yaitu 44% adalah perusahaan swasta dan 26% adalah perusahaan publik. Organisasi swasta dan publik masing-masing mengalami kerugian rata-rata sebesar USD 150.000. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat 69% *fraud* yang dilaporkan. Perusahaan swasta memiliki jumlah kasus yang sama dengan tahun 2020, yaitu sebesar 44%, namun memiliki kerugian sebesar USD 120.000. Pada perusahaan publik memiliki jumlah kasus sebesar 25%, yang berbeda 1% dengan tahun 2020 dan mengalami kerugian sebesar USD 118.000.

Di tahun 2020, organisasi pemerintahan terdapat 16% kasus *fraud* dengan nilai kerugian sebesar USD 100.000, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 18% kasus *fraud* yang dialami organisasi pemerintah dengan kerugian sebesar USD 138.000. Namun, di tahun 2020 dan 2022 organisasi nirlaba hanya melaporkan 9% kasus *fraud* dan mengalami kerugian terkecil dengan masing-masing sebesar USD 75.000 dan USD 60.000. Banyak organisasi nirlaba memiliki sumber daya keuangan yang terbatas sejak awal, sehingga kerugian sebesar ini dapat menghancurkan entitas tersebut.

Tabel 2. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Tipe Organisasi secara Global Tahun 2020 dan 2022

Tipe Organisasi	2020		2022	
	Kasus (%)	Kerugian	Kasus (%)	Kerugian

Perusahaan Swasta	44%	150,000	44%	120,000
Perusahaan Publik	26%	150,000	25%	118,000
Pemerintah	16%	100,000	18%	138,000
Organisasi Nirlaba	9%	75,000	9%	60,000
Lainnya	5%	100,000	4%	218,000

Pada laporan yang diterbitkan oleh ACFE terkait *fraud* secara global, tingkat organisasi pemerintah dibagi menjadi 4 yaitu tingkat nasional, provinsi, lokal, dan lainnya. Laporan ACFE tahun 2022 menunjukkan bahwa persentase kasus *fraud* tertinggi terjadi pada tingkat pemerintah nasional yaitu sebesar 46%. Konsisten dengan hasil dari laporan tahun 2020, tingkat pemerintah nasional juga menjadi tingkat organisasi pemerintahan dengan kasus *fraud* terbanyak dibandingkan tingkat lainnya yaitu sebesar 45%. Hasil ini juga menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 pada masa pandemi *Covid-19*. Rata-rata kerugian akibat *fraud* yang dialami oleh organisasi pemerintah tingkat nasional pada survei tahun 2020 setara dengan tahun 2022 yaitu sebesar \$200,000. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya kerugian akibat *fraud* pada saat survei tahun 2020 hingga tahun 2022 bahkan tidak menurun, namun persentase terjadinya kasus bertambah jika dibandingkan dengan tingkat pemerintahan lainnya.

Hasil survei ACFE secara global terhadap *fraud* pada tahun 2020 menunjukkan bahwa organisasi pemerintah tingkat lokal menduduki posisi kedua dengan persentase kasus terbanyak yaitu sebesar 32% dan rata-rata kerugian sebesar \$75,000. Tingkat provinsi berada pada posisi ketiga yaitu dengan persentase kasus sebesar 21%, namun dengan rata-rata kerugian lebih besar yaitu \$91,000. Berbanding terbalik dengan hasil survei tahun 2022 yang menunjukkan bahwa organisasi pemerintah tingkat provinsi memiliki persentase kasus yang lebih besar dibandingkan lokal, serta dengan rata-rata kerugian yang lebih besar pada organisasi tingkat lokal dibandingkan provinsi.

Tabel 3. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Tingkat Organisasi Pemerintah secara Global Tahun 2020 dan 2022

Tingkat Organisasi Pemerintah	2020		2022	
	Kasus (%)	Kerugian	Kasus (%)	Kerugian
Nasional	45%	200,000	46%	200,000
Provinsi	21%	91,000	27%	56,000
Lokal	32%	75,000	25%	125,000
Lainnya	2%	N/A	2%	N/A

Apabila dilihat berdasarkan ukuran organisasi yang diukur dengan jumlah karyawannya, perusahaan yang memiliki jumlah karyawan 1000 hingga 9999 orang konsisten memiliki persentase kasus terbanyak dibandingkan ukuran perusahaan lainnya pada tahun 2020 dan 2022. Berdasarkan [29], persentase kasus pada perusahaan dengan jumlah karyawan 1000-9999 orang adalah sebesar 27% dan berdasarkan [30] adalah sebesar 29%. Namun hasil ini sebenarnya tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap ukuran organisasi yang lainnya, karena hasil menunjukkan persentase kasus di rentang 22% hingga 29% dan selisih antara ukuran organisasi tidak melebihi 5%. Oleh karena itu, hasil survei ini mengingatkan bahwa

semua jenis dan ukuran perusahaan masih perlu meningkatkan pengendalian internalnya dan berbagai upaya untuk mencegah *fraud* terus terjadi dari tahun ke tahun.

Tabel 4. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Ukuran Organisasi secara Global Tahun 2020 dan 2022

Ukuran Organisasi	2020		2022	
	Kasus (%)	Kerugian	Kasus (%)	Kerugian
<100 Karyawan	26%	150,000	22%	150,000
100-999 Karyawan	23%	120,000	24%	100,000
1.000-9.999 Karyawan	27%	100,000	29%	100,000
10.000+ Karyawan	25%	140,000	25%	138,000

Selain itu, laporan ACFE 2020 dan 2022 juga mengungkapkan berbagai skema *fraud* yang paling banyak terjadi berdasarkan survei. Skema-skema *fraud* yang disebutkan termasuk korupsi, penagihan, penggelapan cek, penggantian biaya, manipulasi laporan keuangan, pencurian uang tunai, dan lain-lain. Pada laporan ACFE: *Report to the Nations* tahun 2020 dan 2022 ini, persentase banyaknya kasus *fraud* per skema diungkapkan berdasarkan ukuran organisasinya. Ukuran organisasi tersebut diukur dengan jumlah karyawannya dan dibagi menjadi dua kategori yaitu organisasi dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang dan di atas 100 orang. Laporan tahun 2020 dan 2022 secara konsisten menunjukkan bahwa skema korupsi adalah skema *fraud* yang paling banyak terjadi secara global, baik pada perusahaan kecil dengan jumlah karyawan di bawah 100 orang maupun perusahaan besar dengan jumlah karyawan di atas 100 orang. Hasil laporan ACFE secara global pada tahun 2020 dan 2022 ini sama dengan hasil survei *fraud* di Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan korupsi sebagai skema *fraud* terbanyak yang dilakukan.

Tabel 5. Jumlah Kasus Skema Berdasarkan Ukuran Organisasi secara Global Tahun 2020 dan 2022

Kasus Skema	2020		2022	
	<100 Karyawan	100+ Karyawan	<100 Karyawan	100+ Karyawan
Korupsi	38%	47%	24%	54%
Penagihan	30%	17%	13%	19%
Penggelapan Cek dan Pembayaran	22%	6%	10%	8%
Penggantian Biaya	20%	13%	7%	11%
Daftar Gaji	17%	7%	8%	8%
<i>Skimming</i>	15%	9%	9%	8%
Non Tunai	16%	19%	9%	19%
Manipulasi Laporan Keuangan	14%	10%	5%	10%
Kas di Tangan	13%	10%	7%	9%

Pencurian Uang Tunai	13%	6%	7%	7%
<i>Register Disbursement</i>	4%	2%	1%	3%

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh [29], [30] tahun 2020 dan 2022, terdapat beberapa industri organisasi yang terlampir di tabel 6 ini. Dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2022, industri yang paling sering melaporkan kasus *fraud* adalah perbankan dan jasa keuangan, pemerintahan dan administrasi publik, dan manufaktur. Hal ini tidak berarti bahwa lebih banyak *fraud* yang terjadi pada industri-industri tersebut, karena mungkin saja hanya menunjukkan bahwa organisasi dalam industri ini mempekerjakan lebih banyak *Certified Fraud Examiner* dibandingkan dengan yang lain. Namun, di era pandemi *Covid-19* pada tahun 2020, industri yang mengalami kerugian tertinggi adalah pertambangan yaitu sebesar USD 475.000 dan industri berikutnya yang mengalami kerugian tertinggi adalah energi yaitu sebesar USD 275.000. Sedangkan, pada tahun 2022, yang mengalami kerugian tertinggi adalah industri *real estate* dengan kerugian sebesar USD 435.000 dan industri berikutnya yang mengalami kerugian tertinggi adalah perdagangan grosir yaitu sebesar USD 400.000.

Tabel 6. Jumlah Kasus dan Kerugian Berdasarkan Industri Organisasi secara Global Tahun 2020 dan 2022

Industri Organisasi	2020		2022	
	Jumlah Kasus	Kerugian	Jumlah Kasus	Kerugian
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan	40	100,000	39	154,000
Seni, Hiburan, dan Rekreasi	39	90,000	41	73,000
Perbankan dan Jasa Keuangan	386	100,000	351	100,000
Komunikasi dan Penerbitan	15	115,000	-	-
Konstruksi	80	200,000	78	203,000
Pendidikan	82	65,000	69	56,000
Energi	91	275,000	97	100,000
Layanan Makanan dan Perhotelan	60	114,000	52	55,000
Pemerintahan dan Administrasi Publik	195	100,000	198	150,000
Kesehatan	149	200,000	130	100,000
Informasi (Misalnya, Penerbitan, Media, Telekomunikasi)	-	-	60	58,000
Asuransi	85	70,000	88	130,000
Manufaktur	185	198,000	194	177,000
Pertambangan	26	475,000	22	175,000

<i>Real Estate</i>	52	254,000	41	435,000
Keagamaan, Amal, atau Layanan Sosial	43	76,000	58	78,000
Eceran	91	85,000	91	65,000
Layanan (Lainnya)	30	150,000	32	100,000
Layanan (Profesional)	54	150,000	41	125,000
Teknologi	66	150,000	84	150,000
Telekomunikasi	67	250,000	-	-
Transportasi dan Pergudangan	65	150,000	82	250,000
Utilitas	20	163,000	30	200,000
Perdagangan Grosir	25	130,000	28	400,000

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2020, pandemi *Covid-19* telah menimbulkan keadaan krisis pada berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan dan keselamatan manusia, namun pandemi ini secara tidak langsung juga menyebabkan perekonomian semakin lemah dan buruk. Hal ini dapat terlihat jelas dengan banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga daya beli rakyat juga menurun drastis. Pengawasan juga berkurang karena perusahaan lebih fokus menghadapi krisis pandemi *Covid-19*. Tindakan ini membuka peluang bagi para pelaku *fraud* di perusahaan yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, kejahatan dan kecurangan dapat semakin meningkat akibat pandemi ini.

Kasus *fraud* dapat ditemukan pada berbagai wilayah termasuk Indonesia, wilayah Asia-Pasifik, maupun secara global. Organisasi yang terlibat kasus *fraud* di Indonesia berdasarkan kajian laporan ACFE meliputi organisasi pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, dan organisasi nirlaba. Sesuai dengan data laporan ACFE Indonesia pada tahun 2019 pemegang kerugian tertinggi dialami oleh organisasi pemerintahan dengan tingkat kasus sebesar 48,50% dimana hampir mencapai setengah populasi. Keadaan ini dapat dikarenakan tingkat korupsi yang bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa korupsi atau penyalahgunaan aset sering terjadi di Indonesia.

Berdasarkan laporan ACFE, kejahatan *fraud* telah meningkat secara signifikan setelah pandemi *Covid-19* melanda, terutama *cyber fraud*. Hal ini disebabkan oleh penerapan jarak sosial yang mengharuskan segala pola interaksi untuk beralih pada dunia maya, sehingga tingkat kejahatan di dunia maya juga meningkat drastis. Selain itu, penurunan nilai ekonomi juga mengakibatkan hilangnya pengendalian terhadap harga barang dimana, turut memicu kehancuran pengendalian lainnya. Berbagai tekanan-tekanan yang timbul sebagai akibat dari kondisi inilah yang memicu tindakan *fraud* terjadi di berbagai wilayah.

Laporan ACFE edisi wilayah Asia Pasifik tahun 2020 dan 2022 yaitu tahun pandemi *Covid-19* terjadi memperlihatkan bahwa perusahaan swasta mengalami persentase kasus *fraud* terbanyak dibandingkan jenis perusahaan lainnya. Selain itu, hasil survei juga menunjukkan perusahaan swasta mengalami rata-rata kerugian terbesar akibat *fraud* dibandingkan jenis perusahaan lainnya. Dengan diraihanya jumlah kerugian tertinggi oleh perusahaan swasta, memperlihatkan bahwa internal perusahaan memiliki tingkat tata kelola perusahaan yang rendah atau kurang efektif. Oleh karena itu, perusahaan swasta harus lebih berhati-hati terhadap adanya *fraud* dan meningkatkan pengendalian internal perusahaannya. Tingkat kerugian yang tinggi tentunya akan mengancam kelangsungan usaha. Melihat dari risiko yang timbul, seluruh pelaku usaha swasta perlu untuk lebih menekankan peran audit forensik disertai audit investigasi. Terlebih lagi, apabila krisis keuangan ataupun resesi ekonomi terjadi, hal ini akan membawa malapetaka yang membahayakan sebab, tidak hanya pelaku usaha akan tetapi, nilai ekonomi negara juga akan mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis merasa masih terdapat banyak ruang untuk dapat dikembangkan mengenai penelitian ini. Oleh karena itu, untuk dapat menyajikan penelitian yang lebih lengkap terkait profil korban *fraud* di seluruh dunia, penulis menyarankan peneliti berikutnya untuk

dapat mencari dan mengumpulkan data yang lebih banyak sehingga dapat menghasilkan rangkuman serta hasil penelitian yang lebih kompleks. Penulis juga menyarankan peneliti berikutnya untuk menambahkan lebih banyak kategori-kategori korban *fraud* misalnya korban berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain sebagainya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] E. Bar Lev, L.-G. Maha, and S.-C. Topliceanu, "Financial frauds' victim profiles in developing countries," *Front. Psychol.*, vol. 13, no. October, pp. 1–14, 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.999053.
- [2] K. Budiartini, G. A. R. S. Dewi, and N. T. Herawati, "Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi dalam perspektif fraud diamond (Studi empiris pada bank perkreditan rakyat (BPR) kabupaten buleleng)," *J. Ilm. Mhs. Akuntansi Univ. Pendidik. Ganesha*, vol. 10, no. 2, pp. 2614–1930, 2019.
- [3] Europol, *European union serious and organised crime threat assessment (EU SOCTA). A corrupting influence: The infiltration and undermining of europe's economy and society by organised crime.* 2021.
- [4] D. G. Putra, "Pendekatan Remote Auditing Untuk Internal Audit Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud) Pada Masa Pandemi Covid-19," *J. Ecogen*, vol. 4, no. 1, p. 1, 2021, doi: 10.24036/jmpe.v4i1.10575.
- [5] A. R. D. Yulistianingsih, F. Hadi, Nurhabiba, and Suhartono, "Peranan akuntan forensik dalam mengatasi fraud dan korupsi di lembaga pemerintahan," *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 135–146, 2020, doi: 10.24252/isafir.v1i2.18290.
- [6] O. Yanto, S. Samiyono, S. Walangitan, and Rachmayanthi, "Mengoptimalkan peran perguruan tinggi dalam mengurangi perilaku korupsi," pp. 70–84, 2020.
- [7] M. Learns Tay, S. Chairika, and S. Maria Theresia Barahama, "Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia," *Sibatik J. / Vol.*, vol. 2, no. 1, pp. 223–232, 2022, [Online]. Available: <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK>.
- [8] O. Zuberi and S. I. Mzenzi, "Analysis of employee and management fraud in Tanzania," *J. Financ. Crime*, vol. 26, no. 2, pp. 412–431, 2019, doi: 10.1108/JFC-01-2018-0012.
- [9] M. Deliema, D. Shadel, and K. Pak, "Profiling Victims of Investment Fraud: Mindsets and Risky Behaviors," *J. Consum. Res.*, vol. 46, no. 5, pp. 904–914, 2020, doi: 10.1093/jcr/ucz020.
- [10] Y. Z. Christian, N., Basri, "Analysis of Fraud Triangle , Theory to Detecting Corporate Fraud in Indonesia," *Int. J. Bus. Manag. Technol.*, vol. 3, no. 4, p. ISSN 2581-3889, 2019.
- [11] N. Desai, "Understanding the Theoretical Underpinnings of Corporate Fraud," *Vikalpa*, vol. 45, no. 1, pp. 25–31, 2020, doi: 10.1177/0256090920917789.
- [12] A. P. N. A. Haqq and G. S. Budiwitjaksono, "Fraud Pentagon For Detecting Financial Statement Fraud," *J. Econ. Business, Account. Ventur.*, vol. 22, no. 3, pp. 319–332, 2019, doi: 10.14414/jebav.v22i3.1788.ABSTRACT.
- [13] K. Audit, D. I. Masa, V. C. Mulyandini, and R. K. Natita, "ACCOUNTHINK : Journal of Accounting and Finance," vol. 6, no. 02, pp. 145–157, 2021.
- [14] G. L. Vousinas, "Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model," *J. Financ. Crime*, vol. 26, no. 1, pp. 372–381, 2019, doi: 10.1108/JFC-12-2017-0128.
- [15] N. N. A. Suryandari and G. Gayatri, "Finacial Fraud Scandal: Motivasi, Konsekuensi dan Upaya Memerangi Fraud," *J. Samudra Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 2, pp. 177–190, 2022, doi: 10.33059/jseb.v13i2.4412.
- [16] O. Z. Kalovya, "Determinants of occupational fraud losses: offenders, victims and insights from fraud theory," *J. Financ. Crime*, 2020, doi: 10.1108/JFC-10-2019-0136.
- [17] M. Junger, V. Wang, and M. Schlömer, "Fraud against businesses both online and offline: Crime scripts, business characteristics, efforts, and benefits," *Crime Sci.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–15, 2020, doi: 10.1186/s40163-020-00119-4.
- [18] M. Mardianto and C. Tiono, "Analisis Pengaruh Fraud Triangle Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan," *J. Benefita*, vol. 1, no. 1, p. 87, 2019, doi: 10.22216/jbe.v1i1.3349.
- [19] O. Access, U. I. Batam, U. Trisakti, S. Lecturer, and U. Trisakti, "Analysis of Fraud Triangle , Fraud Diamond and Fraud Pentagon Theory to Detecting Corporate Fraud in Indonesia," vol. 3, no. 4, pp. 73–78, 2019.
- [20] M. T. Whitty, "Predicting susceptibility to cyber-fraud victimhood," *J. Financ. Crime*, vol. 26, no. 1, pp. 277–292, 2019, doi: 10.1108/JFC-10-2017-0095.
- [21] N. Christian and J. Veronica, "Dampak Kecurangan Pada Bidang Keuangan Dan Non-Keuangan

- 
- Terhadap Jenis Fraud Di Indonesia,” *J. Ris. Akunt. Mercu Buana*, vol. 8, no. 1, pp. 91–102, 2022.
- [22] R. Kassem, “Elucidating corporate governance’s impact and role in countering fraud,” *Corp. Gov.*, vol. 22, no. 7, pp. 1523–1546, 2022, doi: 10.1108/CG-08-2021-0279.
- [23] P. Achyarsyah and M. Rani, “Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan,” *J. manajemen/akuntansi*, vol. 5, no. 2, pp. 1–27, 2018.
- [24] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [25] W. Darmalaksana, “Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan,” pp. 1–6, 2020.
- [26] ACFE, *Association of Certified Fraud Indonesia*. 2019.
- [27] Y. Suprpto, N. Angelina, and S. Ng, “YUME : Journal of Management Analisis Pengaruh COVID-19 terhadap Kegiatan Ekspor dan Impor antara Indonesia dengan Cina,” vol. 6, no. 2, pp. 160–166, 2023.
- [28] ACFE, *Association of Certified Fraud Examiners Asia Pacific Edition*. 2020.
- [29] ACFE Global, *Association of Certified Fraud Examiners. Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse: 2020 Global Fraud Study*. 2020.
- [30] ACFE Global, *Association of Certified Fraud Examiners. Occupational Fraud 2022: A Report to the nations*. 2022.